

MENGANTISIPASI POLITIK REPRESENTASI MENJELANG PILKADA 2018 DI PAPUA (Fenomena Politik Dari Masa ke Masa yang Tidak Pernah Pupus)

Avelinus Lefaan*

*Jurusan Sosiologi FISIP Uncen

Email : avelefaan11829@gmail.com

Abstrak : Artikel ini merupakan hasil kajian terhadap dinamika politik Pilkada serentak tahun 2018 di Papua. Metode kajian menggunakan pendekatan analisis wacana terkini dalam hal ini pada wacana Politik Representasi. Di Papua terjadi praktik politik representasi yang dilakukan oleh para elit papua, baik dalam pemilihan kepada daerah maupun pemilihan legislatif. Salah satunya adalah Karena struktur sosial dan budayanya adalah masih bersifat patrimonial. Hasil kajian menunjukkan bahwa menjelang pemilihan kepala daerah, berbagai kampanye berisikan janji-janji politik disampaikan kepada masyarakat seakan-akan janji-janji kampanye itu merupakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ternyata setelah terpilih menjadi kepala daerah, maka banyak program pembangunan yang tidak dapat direalisasi bahkan melenceng dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Akibatnya Masyarakat melakukan resistensi terhadap program-program pembangunan tersebut karena memang program tersebut bukan merupakan kebutuhannya.

Kata kunci: Politik Representasi, Pilkada, Patrimoniali, Resistensi

Abstract : This article is the result of a study on the political dynamics of Pilkada in 2018 in Papua. The study method uses the current discourse analysis approach in this case on the discourse of Political Representation. In Papua there is a political practice of representation conducted by the elite of Papua, both in the elections to the region and legislative elections. One is because the social structure and culture is still patrimonial. The results show that in the run up to the local elections, various campaigns containing political promises were presented to the public as if the campaign's promises were what the people needed. It turned out that after being elected head of the region, so many development programs that can not be realized even deviated from what the community needs. As a result, the community is doing resistance to the development programs because the program is not a necessity.

Keywords : Political Representation, General Election, Patrimoniali, Resistance

Menjadi seorang pemimpin, apalagi untuk sebuah kabupaten atau Provinsi di era demokrasi Indonesia saat ini tidaklah mudah. Fakta menunjukkan bahwa sudah banyak Bupati dan Gubernur dari Sabang sampai Merauke yang ditangkap karena harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi Provinsi Papua yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan beberapa Bupati).

Sebagai Provinsi yang memiliki status Otonomi Khusus sejak tahun 2001, maka Pemilihan kepala daerah di Papua menjadi sarana politik utama dan ikut menentukan bagaimana jalannya tata pemerintahan yang baik dan mengikat semua warga negara yang ada di Provinsi ini. Semua kekuatan politik kepartaian sudah mulai melakukan berbagai persiapan menjelang perhelatan politik besar tersebut untuk merebut kekuasaan secara sah dan mendapat mandat dari pemilik utamanya, yaitu seluruh rakyat Papua. Melalui Pilkada tersebut diharapkan akan dapat menjaring Bupati dan Gubernur yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam mengemban tugas untuk membawa masyarakat Papua ke arah tercapainya amanat Undang-undang Otonomi Khusus no 21 Tahun 2001 yang sejahtera. Akan tetapi justru disinilah letak persoalannya, apakah melalui

pilkada selama ini, rakyat Papua di Era Otonomi Khusus telah mendapatkan pemimpin yang sesuai yang mereka harapkan?

Merujuk pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, sudah 16 tahun berjalannya Otonomi khusus di Papua, tidak sedikit kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik, terutama menjawab janji-janjinya pada saat kampanye, dan belum direalisasi kebutuhan masyarakat hingga saat ini secara tuntas. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat banyak kegagalan/kendala pembangunan yang dilakukan pada setiap tahun kegiatan pembangunan pada lima (5) tahun terakhir dalam penggunaan APBD Provinsi Papua (laporan Badan Anggaran DPRD tahun 2015, tahun 2016 tahun 2017). Berdasarkan kegagalan pembangunan yang dilakukan selama lima tahun terakhir, tersebut, menunjukkan bahwa apa yang diprogramkan dalam visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur, para Bupati ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya sejumlah Bupati dan Gubernur serta pimpinan parpol maupun Profesional, harus berurusan dengan KPK dan dipenjarakan karena terlibat korupsi serta persoalan lainnya.

Sebegitu lama fenomena tersebut berlangsung di Papua, hingga fase perkembangan saat sekarang, rakyat boleh dikata belum mendapatkam sosok pemimpin kuat yang mampu membawa rakyat keluar dari berbagai persoalan fundamental, seperti kemiskinan, korupsi, kesejahteraan dan konflik sosial politik lainnya dengan berlatar belakang primordialisme. Sebagaimana yang disebutkan oleh Adam Schwarz, 1994 (dalam Budi Setiawan, 2011) bahwa, Jika dalam sebuah pemilihan perebutan kekuasaan kepala daerah si calon pemimpin tidak dibina secara baik oleh partai politik pendukung dengan berbagai pengetahuan politik, dan tata pemerintahan (*good Governance*), maka cenderung politik *representative* akan digunakan. Hal tersebut terlihat dengan digunakan sebagai janji-janji muluk, disaat kampanye untuk membangun opini rakyat guna memilih dirinya. Sebuah kondisi dimana terjadi lingkaran kekuasaan tanpa memahami kebutuhan hidup masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Benny Susetyo, 2009 (dalam Avelinus Lefaan, 2013) adalah sebagai sebuah demokrasi mati suri karena menguatnya politik representasi membawa demokrasi kehilangan roh demokrasi.

Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan pendidikan politik cerdas, tetapi menjadi tumbal kebencian atas nama etnisitas. Semua hal tersebut mengindikasikan bahwa persoalan memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan amanat hati nurani rakyat tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya posisi pemimpin di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara di era Otonomi Khusus Papua, maka diperlukan berbagai upaya untuk memberikan kesadaran politik bagi masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan pilihan-pilihan calon kepala daerah yang mampu membawa rakyatnya menuju sejahtera. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ignas Kleden (1981) bahwa untuk melakukan berbagai upaya dalam menyadarkan konstituen guna menentukan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, maka pemerintah maupun partai politik harus melakukan pembinaan politik, seperti kajian-kajian konflik dan seminar-konflik. Hal ini tidak lain guna mengeliminir fenomena konflik politik pemilihan kepala daerah yang penuh dengan politik primordialisme dan politik representasi yang masih berjalan hingga saat ini.

PEMBAHASAN

Praktik Politik Representasi

Representasi merupakan salah satu konsep utama dalam *cultural Studies*, karena proses sebelumnya yang sarat dengan konstruksi oleh pihak dominan.

Representasi sosio-kultural, politik dan bahkan realitas sosial itu sendiri merupakan realitas yang dikonstruksi oleh sebuah kekuatan dominan, Chris Barker, 2000 (dalam Bayu Wahyono, 2004). Dengan demikian bahwa representasi merupakan apa yang dirancang oleh para elit sebagai pihak dominan yang disuarakan dengan maksud ingin memperoleh sesuatu dari rakyat, seakan-akan apa yang disampaikan kepada rakyat, merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh rakyat, yang perlu diperjuangkan jika calon tersebut memenangkan pemilihan kepada daerah.

Papua menjelang pemilihan kepala Daerah tahun 2018 hampir dapat dipastikan para elite politik pendukung Calon Gubernur dan wakil Gubernur senantiasa memasang baliho yang berisi gambar para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang maju menjadi calon pimpinan pemerintahan. Dalam baliho itu di samping terdapat gambar calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung, biasanya juga dilengkapi dengan kata-kata *advertorial* atau iklan politik yang menarik perhatian publik. Kata-kata yang dipilih biasanya bermuatan janji-janji elite yang ditujukan kepada rakyat. Sementara para pendukung yang juga adalah elit politik dan para konstituennya senantiasa mengklaim bahwa apa yang akan dilakukan oleh calon Gubernur yang didukungnya adalah demi, untuk, dan atas oleh rakyat.

Disinilah rakyat dituntut harus benar-benar tahu dan memahami apa yang disampaikan oleh Calon kepala daerah (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hendak dipilih) sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak. Apalagi rakyat kecil yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sudah pasti tidak memahami materi kampanye yang disampaikan oleh Calon kepala daerah sebagai program prioritas pembangunan jika terpilih. Pendampingan politik dan pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai partai politik, selama ini tidak pernah dilakukan sampai pada masyarakat bawah (*grass root*). Inilah yang merupakan dampak yang paling dirasakan jika saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan.

Pada akhirnya rakyat memilih bukan berdasarkan rasionalitasnya tetapi memilih berdasarkan unsur primordialisme. Hal ini mengakibatkan rakyat hanya dipakai sebagai kelompok pemberi suara, bukan pemberi kekuasaan mutlak bagi calon kepemimpinan yang akan membawa masa depan rakyat menjadi sejahtera. Inilah awal kegagalan pembangunan bagi kepemimpinan kepala daerah yang terpilih, sebagai akibat rakyat memilih bukan untuk menjawab kebutuhan mereka dimasa kepemimpinan kepala daerah yang baru tetapi rakyat hanya memilih berdasarkan ikatan primordialisme saja.

Dengan demikian kegagalan Pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kegagalan tersebut merupakan bagian dari politik representasi yang dilakukan dan diwujudkan melalui visi dan misi yang dikampanyekan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Politik Atas Nama Rakyat

Berbagai isi kampanye yang berisikan kata-kata seperti “Papua Cerdas”, “Papua Bangun”, “Mandiri”, “Sejahtera”, “Damai”, “Aman, dan sejenisnya senantiasa digunakan dalam praktik politik atas nama rakyat. Di Papua isu utama yang diangkat oleh Calon Gubernur dan wakil Gubernur berkisar pada masalah kemiskinan dan kebutuhan akan rasa aman, Cerdas dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu kata-kata yang ditawarkan dalam berkampanye adalah kata rakyat sejahtera dan Papua damai, Papua Cerdas juga tidak sedikit yang mengangkat isu di seputar masalah pluralisme dan persatuan, sehingga kata-kata yang ditawarkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta elit politik pendukung adalah toleransi, menghormati perbedaan, rukun, persatuan, dan sejenisnya. Semua kata-kata yang mengandung mantra politik itu ditujukan pada rakyat Papua, karena elite mengira bahwa rakyat Papua butuh seakan akan butuh apa yang disampaikan tersebut.

Dengan keadaan tersebut, maka para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ingin merebut dukungan publik, ramai-ramai menjajakan diri dengan memajang gambarnya di baliho-baliho. Tidak ada cara lain bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika ingin mendapat dukungan publik, kecuali dengan memasang iklan diri yang ditujukan kepada rakyat. Karena itu kata-kata bombastis, penuh janji, dan advertorial tersebar di ruang-ruang publik. Pemasaran politik atau political marketing menjadi begitu penting dalam sistem pemilu sekarang ini, karena upaya individual menjadi aktivitas utama bagi setiap elite politik dalam merebut simpati rakyat.

Di Papua, kata-kata Papua cerdas, demi rakyat sejahtera dan damai adalah kata-kata yang dianggap efektif dalam merebut hati publik. Mengapa demikian, masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah fundamental yang melilit rakyat Papua. Dengan pilihan kata-kata sakti itu, para elite politik memainkan wacana politik dalam dinamika pertarungan antarelite di Papua.

Sebagai contoh, dalam pemilihan Bupati Jayapura tahun 2017 yang dua kali melakukan pemilihan, mengaku bahwa bersama tim suksesnya mereka mendiskusikan secara intens bagaimana mencari pilihan kata yang sekiranya dapat berpotensi merebut simpati publik. Semua sepakat bahwa intinya adalah membidik rakyat

dengan kata-kata yang tepat. Sasaran utama adalah rakyat agar mereka bersedia memberikan dukungan. Tidak penting apakah, nanti akan dapat diwujudkan dalam suatu kebijakan kelak jika jadi mereka jadi, yang penting adalah bagaimana menarik hati rakyat agar bersedia mendukung. Oleh karena itu satu strategi utama adalah menampilkan diri atas nama kepentingan rakyat itu yang utama.

Tidak mengherankan jika kemudian para elite politik baik di tingkat nasional maupun lokal saling menampilkan diri dihadapan rakyat dengan klaim bahwa mereka berkomitmen terhadap nasib rakyat. Sebagai mana yang disebutkan Marsetio, 2011 bahwa, Politik pengatasnamaan rakyat menjadi gejala yang marak melalui permainan bahasa politik para elite politik lokal. Kata-kata populis itu tidak bermakna dan sangat sarat dengan muatan retorika dan terasa klise, tetapi secara empirik nasib rakyat tetap tidak berubah, tetap miskin dan jauh dari sejahtera. Gejala inilah yang termasuk dalam praktik politik representasi dalam Pilkada. Kata sejahtera dan mandiri lebih merupakan jargon politik elite, maka publik pun kehilangan kepercayaan terhadap elite politik. Proses delegitimasi terhadap Parpol dan elite politik sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari maraknya praktik politik representasi.

Di Papua praktik semacam itu juga dengan mudah dapat ditemukan dalam dinamika pemerintahan. Sebagai ilustrasi misalnya dapat disimak dalam Pidato pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur Provinsi Papua tahun 2010-2014. Gubernur mengklaim sejumlah keberhasilan seperti pemerintahan yang baik pada semua jajaran dan tingkatan, membangun tanah Papua yang damai dan sejahtera dengan titik berat pada perhatian masyarakat di kampung-kampung daerah terpencil dan rakyat miskin di perkotaan. Lebih lanjut Gubernur Papua menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir terbukti rakyat Papua berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang cukup signifikan. Melalui pelaksanaan RESPEK (disaat Gubernur bernabas Suebu) serta saat ini menjadi PROSPEK (oleh Gubernur Lukas Enembe) secara konsisten, dikatakan bahwa ekonomi rakyat terus bertumbuh, lingkungan yang tertata dan terpelihara secara damai, tertib dan teratur. Lapangan pekerjaan bertambah, makanan serta gizi rakyat membaik, pendidikan bertambah baik, perumahan, air bersih, dan sanitasi bertambah baik singkatnya kualitas hidup rakyat Papua terus meningkat dari waktu ke waktu.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa klaim keberhasilan itu mengandung retorika. Pada tahun 2015 Dana Otonomi Khusus Papua sebesar 80% yang diberikan kepada setiap Kabupaten lebih banyak diprioritaskan untuk pembangunan fisik dan pembelian kendaraan dinas yang sebenarnya

dana 80% tersebut untuk dana pemberdayaan masyarakat serta pendidikan secara menyeluruh dan belum dipertanggungjawabkan kepada Gubernur. Demikian pula pelayanan Rumah Sakit Rumah diberbagai daerah belum sepenuhnya melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang ideal. KPG sebagai pendidikan bernuansa budaya yang memiliki ciri-ciri khusus belum dikembangkan secara professional sesuai dengan Perdasi No 3 tahun 2013 tentang pendidikan khusus Papua untuk hal-hak yang khusus (dalam Tanggapan Komisi V terhadap Laporan Gubernur Papua)

Pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Papua telah merancang 17 Rancangan PERDA Non-APBD yang terdiri dari Kabupaten Asmat mengalami 12 Raperdasi dan 5 (lima) Raperdasus namun kesemuanya itu hingga akhir tahun 2016 belum direalisasikan ke masyarakat, terutama ditujukan kepada Orang Asli Papua sebagai amanat Otonomi Khusus yaitu Keperpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan. Demikian pula Gizi buruk, serta kurangnya rumah layak huni yang perlu dibangun bagi masyarakat diberbagai kabupaten. (dalam Tanggapan Komisi V terhadap Laporan Gubernur Papua tahun 2016)

Pada Tahun 2017 masih terjadi kegagalan pembangunan salah satunya rendahnya pengawasan para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah untuk ikut mengawasi kegiatan pembangunan di berbagai daerah di Papua. Tingginya angka buta aksara, kelangkaan penyediaan obat bagi pasien di berbagai daerah, proses rujukan pasien rawat jalan yang tidak dapat dilayani dengan maksimal, keberadaan Komunitas Adat Terpencil yang belum mendapat pelayanan yang maksimal. (dalam Tanggapan Komisi V terhadap laporan Gubernur Papua Tahun 2017).

Apa yang dikatakan oleh Gubernur terus bertumbuh, terus bertambah, terus meningkat, dan terus membaik adalah sebuah ironi, yang pada hakekatnya kondisi obyektif di lapangan sulit dipertanggungjawabkan keberhasilannya. Salah satu contoh masyarakat sering datang berkelompok ke gedung DPR Papua dan juga kantor Gubernur Papua yang mengatakan bahwa Otonomi Khusus tidak berhasil bahkan mengusulkan untuk Otonomi Khusus dikembalikan saja ke pemerintah Pusat, karena para elit politik Papua dianggap tidak mampu menjawab kepentingan rakyat Papua. Gubernur kadang tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi di masyarakat Papua termasuk rakyat kecil di daerah terisolir dan terpencil. Ini artinya bahwa ada perbedaan tentang apa

yang disampaikan para Gubernur dalam berbagai pidato pertanggungjawaban yang serba berhasil tersebut kenyataannya di masyarakat Papua dimana rakyat masih tetap belum sejahtera dan berbagai konflik terjadi dimana-mana.

Pada kenyataannya memang tingkat kesejahteraan rakyat Papua, khususnya di daerah terisolir dan terpencil lainnya, masih belum menggembirakan. Pemberian Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua secara umum memang belum menjadikan rakyat Papua menjadi tambah sejahtera. Tidak mengherankan jika muncul penilaian bahwa Otsus hingga fase perkembangannya sekarang masih belum berhasil mengangkat taraf hidup rakyat Papua. Mereka masih miskin dan tertinggal di tengah semakin besarnya anggaran pembangunan. Dana Otsus yang jumlahnya trilyunan lebih banyak penggunaannya menyimpang dari apa yang telah dirancang yang hanya memberikan akses kepada penguasa. Era Otsus hanya dinikmati oleh segelintir elit saja dan kenyataan ini terasa semakin pahit bagi rakyat Papua. Efek dari kesemuanya ini terlihat pada saat ini sedang terjadi masa kampanye tahun 2018 ini, tidak terasa maraknya seperti kampanye - kampanye pada periode sebelumnya. Hal ini terlihat biasa-biasa saja bahkan tingkat partisipasi masyarakat terlihat menurun.

Pertanyaannya adalah mungkinkah masyarakat sudah bosan atau antipati dengan janji-jani politik pada periode sebelumnya, yang belum direalisasikan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jika dahulu, pada masa pemerintahan Orde Baru rakyat Papua masih miskin dan tertinggal karena perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat. Dana pembangunan pada waktu itu masih sedikit dan bahkan perhatian pusat dapat dikatakan masih sangat kurang terhadap nasib rakyat Papua. Akan tetapi itu semua disadari mereka sebagai warga yang terpinggirkan oleh pemerintah pusat. Sementara sekarang di tengah harapan yang melambung tinggi ketika diberi Otonomi Khusus, tetapi rakyat justru belum merasakan manfaatnya. Rakyat Papua tahu bahwa dana pembangunan di era Otsus sangat banyak, tetapi mengapa tidak mengubah nasib mereka. Dahulu dan sekarang mereka tetap saja miskin dan tertinggal. Kenyataan ini lebih menyakitkan, karena justru di tengah limpahan dana pembangunan yang naik secara tajam, yang hingga saat ini mencapai 72 Trilyun sejak diberlakukan Otonomi Khusus, dimana tahun ini APBD Papua hampir 12 Trilyun rupiah, tetapi belum juga membawa perbaikan nasib menuju lebih sejahtera. Lebih baik tidak mendengar ada dana besar sebagaimana digembar-gemborkan pada era Otsus sekarang ini, daripada mendengar tetapi kenyataannya tetap miskin.

Begitulah, melalui Undang-undang Otsus Papua, pemerintah mendelegasikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah disertai kucuran dana yang juga sangat besar. Dana puluhan trilyun itu di luar dana lain seperti APBD dan dekonsentrasi. Akan tetapi rakyat Papua hingga sekarang belum bisa menikmati karena lebih dinikmati oleh kalangan elite lokal. Bila rakyat Papua tidak sejahtera, sering pernyataan ini muncul dari para elit Papua maupun kaum intelektual Kampus, maka silahkan menyampaikan itu kepada Gubernur, atau Bupati, atau Wali kota, atau DPRD, maupun DPRD kabupaten, karena semua pimpinan di era Otonomi khusus adalah anak Asli Papua. Rakyat Papua belum sejahtera hingga sekarang, meskipun jumlah dana Otsus yang diturunkan pemerintah setiap tahun nilainya besar, jangan salahkan pemerintah pusat, tetapi kesalahan itu ada pada anak-anak asli Papua yang kini menduduki jabatan penting di semua instansi baik dari pucuk pimpinan provinsi maupun kabupaten kota.

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa UU Otonomi Khusus ternyata belum menetes ke bawah, kepada rakyat Papua yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan era Otonomi Khusus. Tujuh belas tahun efektif Undang-undang Otonomi Khusus diterapkan, dengan dukungan dana yang besar, akan tetapi bersamaan dengan itu juga tidak diikuti oleh tingkat kesejahteraan rakyat Papua. Sebaliknya, data Kemiskinan oleh IDEAS dari publikasi data BPS Maret tahun 2013 kemiskinan di Papua sebesar 31,13% dan pada 17 juli 2017 kemiskinan di Papua 27.62% (897.69 ribu).

Hingga saat ini mayoritas rakyat Papua masih dalam kondisi memprihatinkan. Indek Pembangunan Manusia (HDI) Papua juga rendah (yaitu 60%, padahal Produk Domestik Brutto di atas RP 20 trilyun). Penelitian Universitas Cenderawasih tahun 2001 memperlihatkan, 74% penduduk Papua hidup di daerah terisolir serta tidak memiliki akses sarana dan prasarana, transportasi ke pusat pelayanan, terutama yang tinggal di pedesaan, masih hidup dalam taraf ekonomi subsistem. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu berkompetisi dalam sistem ekonomi pasar yang telah dikuasai para pendatang sehingga semakin termarginalisasi di tanah sendiri. Oleh karena itu wajar jika sebagian besar rakyat Papua bersikap skeptis terhadap pidato saat pelantikan beberapa pejabat di kabupaten/kota yang mengatakan bahwa “Kami dipilih oleh rakyat, hati kami untuk rakyat, akan bekerja juga untuk rakyat, dan demi pembangunan kesejahteraan bagi rakyat yang ada di daerah perkotaan, maupun yang tinggal di kampung - kampung serta daerah terpencil. Kami akan membangun masyarakat tanpa membedakan satu sama lain” (Cenderawasih Pos, 21 Juli 2016).

Bagi rakyat Papua kata - kata semacam itu sudah sangat sering didengar dari mulut para elite politik.

Seperti sudah menjadi pandangan semua orang, memang begitulah omongan para pejabat senantiasa ingin demi dan untuk rakyat. Kenyataan akan berbicara lain, bahwa yang akan lebih menikmati adalah para jajaran pejabat dan segenap elite lokal yang memiliki akses kepada kekuasaan. Sementara rakyat tetap tidak berubah, selalu bergulat dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

PENUTUP

Dari hasil kajian tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa perilaku elite Papua dalam praktik politik representasi menunjukkan belum berkembangnya kesadaran bahwa eksistensi mereka ketika memimpin sebuah lembaga pemerintahan adalah rakyat itu sendiri. Oleh karena itu mereka dengan mudah melupakan rakyat ketika sedang memegang kekuasaan. Pemahaman terhadap kekuasaan bagi elite Papua berangkat dari sikap egosentrisme, sehingga kekuasaan rentan dengan penyalahgunaan untuk memikirkan diri mereka sendiri. Disisi lain juga dapat dikatakan bahwa masih terkesan minimnya pemahaman terhadap konsep kekuasaan itu menjadikan para elite politik ramai-ramai mencari kekuasaan atas nama rakyat. Praktik ini sungguh sebuah pengingkaran akan nilai demokrasi yang ironisnya dibangun atas nama demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu ketika rakyat diatasnamakan oleh elite politik dan kemudian memberikan mandat kekuasaan itu kepada para elite, saat itu pula rakyat menjadi teralienasi dari kekuasaan yang menjadi miliknya.

Oleh karena itu perlu juga lembaga politik dan pemerintah di Papua pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bertanggungjawab membina dan memberdayakan masyarakat agar menciptakan masyarakat yang kritis (critical mass) untuk mampu memilih calon pemimpin kepala daerah yang kredibel, acuntabel dan Cerdas memahami kebutuhan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Adam Schwarz, 1994. *A nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Boulder: Westview.
- Benny Susetyo, 2009, *Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta.
- Budi Setiawan, (2011). *Pemberitaan Kasus Rasialisme Dzul- fikri Imadul Bilad terhadap Etnis Papua di Harian Umum Pikiran Rakyat*. Sekripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Cederawasih Pos, 2016, *Pelantikan pejabat Esselon II, dab IV di Kantor Gubernur Prov, Papua, Jayapura*.
- Marsetio, 2011. *Konstruksi Marginalitas Daerah*

- Perbatasan : Sydu Kasus Kepulauan Natuna, Disertasi, kajian Budaya dan Media, SPS UGM.
- Gaffar, Afan, 1992. *Javabese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kleden, Ignas, 1986. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES.
- Laporan Badan Anggaran Legislatif DPR Papua, Tahun 2015.
- Laporan Badan Anggaran Legislatif DPR Papua, Tahun 2016
- Laporan Badan Anggaran Legislatif DPR Papua, Tahun 2017
- Marsetio, 2011. *Konstruksi Marginalitas Daerah Perbatasan: Studi Kasus Kepulauan Natuna, Disertasi, Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana UGM*.
- Martinus Christian Onweng (2010). *Musik Mambesak sebagai Politik Identitas Etnis Papua, Tesis S-2, Universitas Gadjah Mada Program Studi Sosiologi*.
- Nugroho, Heru, 2008. *Otonomi Khusus, Pemekaran Wilayah dan Kelumpuhan Demokrasi: Praktik Politik Etno- sentrisme di Wamena Papua, dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya*, Ning Retnaningsih dkk. (ed.), Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).
- Nurhasim dkk., (2003). *Local Power and Politics in Indonesia*” disunting Edward Aspinall and Greg Fealy (2003)
- Swidler, Ann., 1995. *Culture Power and Social Movements*, dalam Hank Johnstone and Bert Klandermans, ed. *Social Movements and Culture*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Tanggapan Komisi V terhadap laporan Gubernur Papua Tahun 2015
- Tanggapan komisi V terhadap laporan Gubernur papua Tahun 2016
- Tanggapan Komisi V terhadap Laporan Gubernur Papua Tahun 2017 Universitas Cenderawasih,
- Wahyono, Bayu, S. dkk., 2004. *Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi*, Yogyakarta dan Jakarta: Inpedham dan Depkominfo.
- Widjojo S. Muridan, 2001. *Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan*, Paper, ditulis di dalam kerangka “Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh LP3ES dan disponsori oleh The Ford Foundation.